

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

Wanda Natasia Maria*¹, Nana Nur Kirana², Amalia Ulpa³, Dwi Nur Handayani⁴

¹Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr.H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Indonesia; e-mail: wandanatasia01@gmail.com

²Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr.H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Indonesia; e-mail: nananurkirana7@gmail.com

³Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr.H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Indonesia; e-mail: ketapangamalia@gmail.com

⁴ Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr.H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Indonesia; e-mail: dwi.nur@fisip.untan.ac.id

*Correspondence

Received: 13-11-2023; Accepted: 29-11-2023; Published: 30-11-2023

Abstrak: Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak. Data jumlah kemiskinan di kota Pontianak menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Namun melonjak jumlahnya di tahun 2020 yang sebelumnya 29.171 jiwa menjadi 30.700 jiwa dan kemudian menurun lagi jumlahnya di tahun 2022 menjadi 29.610 jiwa. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PKPTK) Kota Pontianak untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak sudah berjalan baik hal ini dilihat dari indikator kesesuaian antara program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi, serta kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan

Abstract: : *This study aims to determine the Implementation of the Community Empowerment Program to Reduce Poverty Rates in Pontianak City. Data on the number of poverty in Pontianak city shows an increase and decrease. However, the number jumped in 2020 from 29,171 people to 30,700 people and then decreased again in 2022 to 29,610 people. Therefore, it is the duty of the local government in this case the Manpower and Transmigration Office through the Pontianak City Technical Implementation Unit for Job Training and Labor Productivity (UPT PKPTK) to reduce poverty through community empowerment. This research uses a qualitative descriptive research method. The results showed that the Implementation of the Community Empowerment Program to Reduce Poverty Rates in Pontianak City has been running well, this can be seen from the indicators of suitability between programs and utilization, suitability between programs and organizations, and suitability between user groups and implementing organizations.*

Keywords: Program Implementation, Community Empowerment Program, Poverty

I. Pendahuluan

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Rasyid (dalam Wulandari et al., 2022) juga menyebutkan bahwa selain fungsi pelayanan dan pembangunan, pemerintahan juga melaksanakan fungsi pemberdayaan. Kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan global yang menjadi tantangan bagi tiap-tiap negara di dunia baik negara berkembang maupun negara maju. Soekanto (dalam Daud & Marini, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berdasarkan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga serta fisiknya di kelompok. Kemiskinan tidak hanya dalam faktor ekonomi namun juga dari faktor non-ekonomi misalnya kurangnya pengetahuan dan keterampilan (Khausar, 2012). Pengentasan kemiskinan tidaklah mudah dilakukan (Sihombing & Iswandi, 2022). Dengan tingkat kemiskinan yang semakin bertambah dibutuhkan upaya dari semua pihak terutama pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program yang akan dilaksanakan (Jaya et al., 2021).

Isu kemiskinan juga dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan *skill* menjadi faktor terjadinya kemiskinan di Indonesia. Sumber daya manusia (SDM) tidak hanya ditingkatkan pada bidang pendidikan formal saja, namun pendidikan non formal juga penting (Ramadhani & Ritonga, 2022). Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberian pelatihan keterampilan punya pengaruh besar dalam hal penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Tentunya pemerintah berperan besar terutama sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha menanggulangi masalah kemiskinan yang berlangsung. Pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan mengacu pada serangkaian tindakan yang dapat membuat masyarakat memanfaatkan lingkungannya secara optimal yang mana nantinya akan menciptakan kemandirian serta kemampuan keluar dari garis kemiskinan melalui tindakan seperti memfasilitasi dan memotivasi masyarakat terkait oleh pemerintah. Menurut Baswir dalam (Budi et al., 2013), kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pertama kemiskinan natural (kondisi miskin dari awal), kedua kemiskinan kultural (kondisi di mana seseorang mampu mencukupi gaya hidupnya dan tidak merasa kekurangan sedikitpun), dan terakhir adalah kemiskinan struktural (terjadinya kemiskinan karena faktor yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri misalnya korupsi).

Menurut Setiadi dan Kolip (dalam Ras, 2013), ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya suatu program penanggulangan kemiskinan yaitu pertama program pengentasan kemiskinan cenderung berupa program bantuan sosial sehingga membuat masyarakat miskin selalu berharap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang faktor penyebab kemiskinan karena sebenarnya kemiskinan disetiap wilayah itu berbeda-beda. Program pengentasan kemiskinan haruslah program yang berkelanjutan yaitu berupa peningkatan keterampilan masyarakat (Murdiansyah, 2014). Sampai saat ini kemiskinan tetap ada dikarenakan program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial dalam bentuk uang tunai atau beras (Ras, 2013), di mana bantuan tersebut tidak bertahan lama dan habis dalam waktu singkat. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar menyiapkan program yang baik untuk mengentas kemiskinan, salah satunya adalah Program Pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PKPTK) kota Pontianak.

Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang tentunya dihadapkan juga dengan tantangan kemiskinan. Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak 4 (empat) Tahun Terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Grafik 1. Data Kemiskinan Kota Pontianak

Berdasarkan grafik di atas, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak mengalami kenaikan dan penurunan. Namun melonjak jumlahnya di tahun 2020 yang sebelumnya 29.171 jiwa menjadi 30.700 jiwa dan kemudian menurun lagi jumlahnya di tahun 2022 menjadi 29.610 jiwa. Dilansir dari bappeda.pontianak.go.id, pandemi termasuk ke dalam satu dari sekian banyaknya penyebab jumlah penduduk miskin di Pontianak meningkat dan keterampilan yang rendah dari mereka yang urbanisasi ke Pontianak juga membuat intensitas masyarakat dengan penghasilan rendah di Pontianak meningkat. Berdasarkan masalah tersebut, pemberdayaan perlu dilakukan utamanya untuk menciptakan individu yang memiliki keterampilan agar siap memasuki dunia kerja atau meningkatkan keterampilan individu yang memang sudah bekerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans bertugas dalam melaksanakan sebagian dari pada tugas pemerintah daerah dengan berdasarkan kepada asas otonomi serta tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pelatihan *soft skills*, Disnakertrans provinsi kalbar memiliki UPT PKPTK di mana dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2022 UPT PKPTK adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Jadi, UPT PKPTK menjadi fasilitator para tenaga kerja atau calon tenaga kerja dalam memperoleh keterampilan yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Karena hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh UPT PKPTK dalam menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak, dengan menggunakan unsur-unsur dalam implementasi program menurut David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020) yang meliputi kesesuaian antara program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Teori implementasi Korten ini diberi nama “*Three Way Fit*” (Rayyan, 2020), atau biasa juga disebut dengan “kesesuaian tiga arah”. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PKPTK Kota Pontianak sebagai pihak yang memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan melalui program pemberdayaan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (N Budi et al., 2013) yang berjudul “*Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tembaksari Kota Surabaya)*”, di mana penelitian tersebut berfokus kepada pelatihan keterampilan dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program sedangkan penelitian ini berfokus kepada program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak.

II. Kajian Pustaka

1. Implementasi

Grindle dalam (Akib, 2010), memberikan pendapat implementasi adalah suatu proses mengenai kegiatan administratif yang bisa diteliti pada program tertentu. Implementasi program adalah proses mengenai pelaksanaan kegiatan yang untuk mencapai tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Suatu proses implementasi akan dilaksanakan jika tujuan dan sasarannya telah ditetapkan, program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan sudah tersusun dan anggarannya sudah ada serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Donald P. Warwick dalam (Andani et al., 2019), memberikan pendapat bahwa dalam proses implementasi suatu program ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impending conditions*).

2. Program

Program adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam suatu implementasi, program adalah unsur yang paling utama karena program akan menjadi proses tercapainya suatu tujuan. Kemudian adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari suatu program, masyarakat terlibat dalam program yang akan dilaksanakan sehingga akan membawa hasil adanya perubahan atau peningkatan dalam kehidupan masyarakat. Jika program tidak memberikan dampak pada kehidupan masyarakat maka program tersebut bisa dikatakan gagal terlaksana. Adanya unsur pelaksana, di mana pelaksanaan ini sangat penting karena pelaksanaan (organisasi ataupun perorangan) bertanggungjawab dalam pengelolaan ataupun pengawasan dalam proses pengimplementasian agar implementasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, pemerintah harus melakukan tindakan yaitu menghimpun sumber dana dan mengelola sumber daya yang ada (Andani et al., 2019).

Korten dalam (Andani et al., 2019), mengatakan bahwa program akan berhasil terlaksana jika ada kesamaan dari unsur implementasi program yaitu:

- a) Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, artinya adalah adanya kesesuaian antara program yang akan dilaksanakan dengan apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran (pemanfaat)
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya adalah adanya kesesuaian antara tugas dalam suatu program dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana program.

- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana artinya adalah adanya kesesuaian antara syarat yang ditentukan oleh organisasi untuk mendapatkan output dari suatu program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok sasaran yang telah melaksanakan program.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (dalam Habib, 2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan sosial dari masyarakat yang bergabung kedalam organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat ini termasuk kedalam konsep pembangunan ekonomi yang terdapat nilai sosial, di mana konsep pembangunan ini terdapat tiga paradigma yaitu *pertama* ditujukan kepada manusia (*people centered*), *kedua* adanya partisipasi (*participatory*), *ketiga* memberdayakan (*empowering*), dan *keempat* adalah berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat yang lemah dan renta sehingga mereka perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan segala perubahan sosial agar masyarakat memiliki kekuatan untuk memenuhi keperluan hidupnya yang bersifat ekonomi, fisik dan sosial. Pemberdayaan adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan asas kerakyatan, oleh karena itu pemberdayaan perlu dibimbing oleh pemerintah atau lembaga untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat. Proses pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat jika dilaksanakan secara efektif dan efisien maka akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan yang berkelanjutan karena masyarakat memiliki tanggung jawab. Melalui pemberdayaan, kelompok masyarakat diberikan dukungan agar mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dan terlibat dalam proses produksi, ekonomi, sosial dan lingkungannya, (Yunus et al., 2017).

4. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Brendley (dalam Kartika, 2013), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Menurut Selo Sumarjan (dalam Yunus et al., 2017), kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor. Pertama faktor individual yaitu kondisi miskin terjadi karena seseorang tidak mempunyai modal keuangan, keterampilan, tidak ada kemampuan berwirausaha dan semangat untuk maju serta sulit untuk mendapatkan akses

pendidikan. Kedua, faktor struktural yaitu kondisi miskin terjadi karena tidak pandai dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta masyarakat tidak terlibat saat pengambilan keputusan. Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dukungan sosial untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

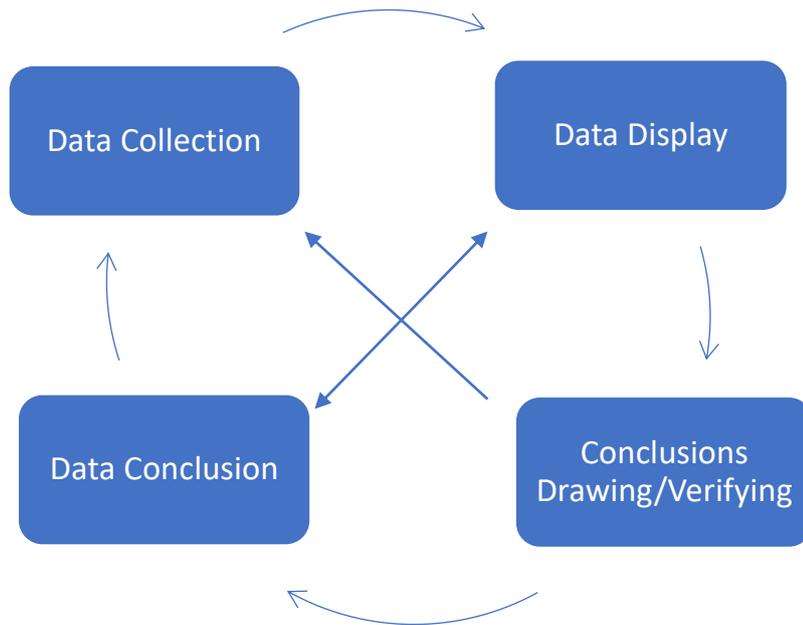
Pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan misalnya melalui pendidikan kewirausahaan yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemiskinan bukan hanya tentang masalah pendapatan atau ekonomi, namun juga masalah multidimensi berupa masalah perumahan, keterbatasan akses produktif, dan rendahnya pembangunan manusia, (Sukidjo, 2009). Dalam menentukan kemiskinan, ada beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan yaitu bisa diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut (kebutuhan untuk bertahan hidup tidak bisa terpenuhi) dan kemiskinan relatif (adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan).

Menurut Starhm (Yunus et al., 2017), untuk mengentaskan kemiskinan maka bisa dilakukan dengan tiga strategi yaitu *pertama* pertumbuhan melalui integrasi ke dalam ekonomi pasar bebas, *kedua* membangun tatanan ekonomi baru dan *ketiga* melakukan pembangunan mandiri dengan melihat faktor kemiskinan. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan juga bisa dilakukan melalui tiga strategi yaitu *pertama* mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro terhadap kemiskinan, *kedua* pemerintahan yang baik dan *ketiga* melakukan pembangunan sosial, (Murdiansyah, 2014).

III. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan apa saja yang ada di UPT PKPTK Kota Pontianak dan bagaimana pengimplementasian program yang ada.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara secara tatap muka dengan narasumber yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang dihasilkan dari data tersebut.



Miles, Huberman dan Saldana (2014)

1. *Data collection* atau pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang didapat melalui wawancara secara langsung kepada narasumber.
2. *Data display* atau penyajian data, dalam penyajian data peneliti mengembangkan informasi deskriptif untuk menarik kesimpulan dan kembali ke tindakan. Bentuk penyajian data yang biasanya digunakan pada tahap ini berupa teks naratif.
3. *Data condensation* atau kondensasi data, data yang disajikan kemudian dipilih sebagai data yang benar-benar mengarah pada tujuan penelitian.
4. *Data conclusion* atau penarikan kesimpulan, peneliti berupaya untuk menyimpulkan dengan menganalisis makna setiap gejala yang ditemukan di lapangan. Setelah itu, membandingkan dan mengkontraskannya dengan teori yang diterapkan dalam penelitian guna menarik kesimpulan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pontianak diperoleh hasil yaitu program pemberdayaannya berupa pelatihan berbasis kompetensi (PBK), Pelayanan Kejuruan dan Sertifikasi.

Tabel 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	
No	Jenis Kompetensi
1	Las
2	Otomotif Kendaraan Roda 2 dan 4
3	Listrik
4	Bisnis dan Manajemen
5	Teknologi Informatika dan Komunikasi
6	Produktivitas Roti dan Kue

Tabel 2. Pelayanan Kejuruan

Pelayanan Kejuruan	
No	Jenis Kompetensi
1	Fashion Tecnology (Menjahit dan Tata Rias)
2	Pariwisata (Barista)
3	Refrigerasi (Service AC dan Kulkas)

Tabel 3. Sertifikasi

Sertifikasi		
No	Jenis Pelatihan	Bidang Kompetensi
1	Pelatihan Ahli K3 Umum	1) Pelatihan Auditor SMK3
		2) Pelatihan Ahli K3 Kimia
		3) Pelatihan Ahli K3 Listrik
		4) Pelatihan Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja
2	Sertifikasi Tenaga Kerja di Ketinggian & Bangunan	1) Sertifikasi Petugas P3K
		2) Sertifikasi Hiperkes Dokter dan Paramedis
3	Operator Boiler, Forklift & Genset	1) Pelatihan Operator Boiler Kelas 1
		2) Pelatihan Operator Boiler Kelas 2
		3) Pelatihan Operator Forklift
		4) Pelatihan Operator Genset
		5) Sertifikasi dan Pembinaan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan teori yang diambil yaitu implementasi program di mana dalam teori ini terdapat 3 indikator yaitu:

Kesesuaian Antara Program Dan Pemanfaatan

Untuk melaksanakan pelatihan pihak UPT melakukan TNA (*Training Need Analysis*) dengan cara menyebarkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan dengan maksud mencari tahu apa saja yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, kemudian di analisis apa yang diperlukan oleh perusahaan, jika sudah mendapatkan hasilnya maka selanjutnya adalah melaksanakan program sehingga menghasilkan output yaitu adanya kesesuaian antara dunia kerja atau industri dengan apa yang diperlukan oleh kelompok pemanfaat. TNA dilaksanakan dengan skema periode tahunan (mencari teori proses TNA), selama satu tahun pihak UPT PKPTK akan melaksanakan TNA ke DUDI (Dunia usaha dan Dunia Industri) dimana proses TNA ini dilakukan pada satu perusahaan di setiap wilayah yang dilakukan selama tiga hari. Setelah mendapatkan hasil TNA maka selanjutnya UPT PKPTK akan membuat sebuah program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Program pelatihan ini akan selalu ada namun untuk jumlah peserta akan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Menurut Tovey (dalam Kristina, 2013), dalam proses TNA dilakukan beberapa proses yaitu, dokumentasi masalah, investigasi masalah, merencanakan keperluan analisis, pemilihan teknis analisis, melakukan analisis dan analisis data. Proses TNA yang dilakukan oleh UPT PKPTK Kota Pontianak selaras dengan teori yang kemukakan oleh Tovey. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Korten yaitu adanya kesesuaian antara program dan pemanfaatan bahwa UPT PKPTK Kota Pontianak menjalankan program pemberdayaan berupa pelatihan di mana program ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan keterampilan.

Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi

Program yang dilaksanakan berupa pelatihan di mana tempat pelaksanaannya disebut dengan UPT PKPTK (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) sehingga organisasi ini menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin mencari kerja. Pelatihan yang ada di UPT PKPTK Kota Pontianak ini untuk orang yang ingin mencari kerja dengan maksud memberikan pelatihan agar memiliki keahlian sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan jika sudah memiliki *skill* atau kemampuan kemudian pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sebelumnya tempat pelatihan ini tidak berada di UPT PKPTK Kota Pontianak melainkan langsung di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Pontianak yang disebut dengan LKI (Latihan Kerja Industri). Sebelum berubah menjadi UPT PKPTK nama sebelumnya adalah BLK (Balai Latihan Kerja) kemudian karena ada arahan kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa harus lebih fokus terhadap program pelatihan, penempatan tenaga kerja, memperluas kesempatan dan meningkatkan produktivitas sehingga namanya diubah menjadi UPT PKPTK (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) sebelumnya tempat pelatihan ini sudah vakum selama dua tahun namun kembali dibuka karena memang pelatihan ini sangat diperlukan untuk para pencari kerja yang memerlukan keterampilan serta perusahaan yang juga memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau kompetensi. Selain pelatihan berbasis kompetensi, UPT PKPTK Kota Pontianak juga memiliki program sertifikasi uji kompetensi setelah lolos dari uji sertifikasi maka para peserta bisa menggunakan sertifikasinya ke luar negeri sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana

UPT PKPTK Kota Pontianak dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mencari pekerja dengan syarat:

- a) Bukan mahasiswa atau para pelajar yang sedang melakukan pendidikan formal.
- b) Memiliki kartu AK1 atau kartu kuning yang dibuat di dinas ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Kartu kuning ini disebut dengan kartu pencari kerja

Untuk yang mengajar pelatihan adalah para pegawai di UPT PKPTK Kota Pontianak yang disebut sebagai instruktur yang dididik kurang lebih enam sampai tujuh bulan di pusat sehingga sudah berkompeten untuk menjadi pengajar. Jika tidak ada instruktur maka pihak UPT PKPTK Kota Pontianak akan mencari instruktur dari luar.

Untuk pelaksanaan program tersebut ada bantuan biaya dari pemerintah pusat dan daerah, di mana pelaksanaan program menyesuaikan dengan anggaran yang ada. UPT PKPTK Kota Pontianak telah dievaluasi selama dua tahun, setelah dua tahun lamanya akhirnya pemerintah kembali memberikan anggaran pada pertengahan tahun 2023 sehingga pelatihan baru dibuka kembali pada bulan oktober namun sementara baru untuk satu kelas saja yaitu otomotif kendaraan sepeda motor. UPT PKPTK Kota Pontianak vakum dikarenakan adanya perubahan organisasi, kemudian dibuka kembali namun bekerjasama dengan tiga perusahaan yang dilaksanakan di UPT PKPTK Kota Pontianak di mana tiga perusahaan ini masing-masing membuka satu workshop sebagai berikut:

- a) Workshop Mekanik (Las) dengan PT. ANTAM (Aneka Tambang TBK)
- b) Workshop Listrik dengan GAPKI (Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia)
- c) Workshop Otomotif dengan PT. WHW (*Well Harvest Winning*)

Jika ingin mendaftar pelatihan maka pendaftarannya bisa dilakukan secara online melalui operator siap kerja dan bisa juga secara offline dengan langsung datang ke UPT PKPTK Kota Pontianak. Dalam setiap skema atau bidang pelatihan ada satu kelas yang berisi 16 (enam belas) orang. Pelatihan yang ada di UPT PKPTK Kota Pontianak ini untuk orang yang ingin mencari kerja dengan maksud memberikan pelatihan agar memiliki keahlian sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan jika sudah memiliki *skill* atau kemampuan kemudian pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Selain pelatihan, UPT PKPTK Kota Pontianak juga ada program sertifikasi uji kompetensi yang telah bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Dinas Ketengakerjaan menyiapkan satu aplikasi yaitu Siap Kerja, aplikasi ini bisa diunduh di *playstore*, aplikasi ini sangat bermanfaat karena memudahkan orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Program pelatihan ini tentunya bisa membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pontianak karena dengan program pemberdayaan bisa meningkatkan *skill* atau kemampuan masyarakat sehingga masyarakat bisa mencari pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki. Menurut Moekijat (dalam Wongsonadi, 2017) program pelatihan bertujuan untuk:

- 1) Membantu masyarakat meningkatkan keterampilan sehingga bisa bekerja lebih efektif dan efisien
- 2) Membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan
- 3) Membantu masyarakat dalam meningkatkan *profesionalisme* dalam bekerja

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari indikator kesesuaian antara program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi, serta kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana. Bentuk implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak difokuskan kepada para pencari kerja dengan bentuk pemberdayaan berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Pelayanan

Kejuruan dan Sertifikasi dengan tujuan untuk memberi kemudahan dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, dengan bekal *skill* yang telah diperoleh melalui program pemberdayaan di UPT PKPTK Kota Pontianak dapat memberi kemudahan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Agar program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PKPTK di kota Pontianak dapat berjalan dengan efektif, Pemerintah harus mendukung program pemberdayaan tersebut dengan memberikan anggaran khusus untuk pelaksanaannya. Program ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan agar mudah dalam mencari pekerjaan sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian ekonomi. Pemerintah diharapkan supaya dapat lebih informatif dan komunikatif kepada sasaran program atau khalayak agar kuota program pelatihan dapat terpenuhi sehingga ke depannya banyak yang mendaftarkan diri dan mengetahui bahwa ada tempat pelatihan yang disediakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas implementasi program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh UPT PKPTK berdasarkan indikator kesesuaian yang dikemukakan oleh Korten. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang dapat diteliti lebih lanjut. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai program pemberdayaan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi suatu program, serta model-model program pemberdayaan masyarakat yang telah diimplementasikan di daerah lain.

VI. Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu. In R. Hartono (Ed.), *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu* (1st ed.). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- BAPPEDA KOTA PONTIANAK. (2021). *Entas Kemiskinan, Pemkot Pontianak Mutakhirkan Data Warga Miskin Terdampak Pandemi*. Bappeda.Pontianak.Go.Id. <https://bappeda.pontianak.go.id/berita/entas-kemiskinan-pemkot-pontianak-mutakhirkan-data-warga-miskin-terdampak-pandemi>

- Budi, D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2013). Implementasi Program Pemerdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 862–871.
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi Porgram Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*, 2, 29–38.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Jaya, N., Sasmito, C., & Wulandari, R. M. C. (2021). Implementasi Program Pemerdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu. *Reformasi 11 Nomor 1*(April), 71. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Kartika, I. N. (2013). Strategi pengentasan kemiskinan terhadap penurunan rumah tangga miskin di kota denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 26–33.
- Khausar. (2012). Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemerdayaan Masyarakat. *Jurnal Visipena*, III(2), 39–70.
- Kristina, A. (2013). Model Training Needs Analysis Untuk Membentuk Perilaku Inovatif SDM Industri Kecil Sepatu Di Jawa Timur. *Pamator*, 6(1), 1–16.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemerdayaan Masyarakat: Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71–92. <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/119>
- N Budi, D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2013). Implementasi Program Pemerdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 862–871.
- Ramadhani, S. P., & Ritonga, R. (2022). Pemerdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Softskill. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 5(2), 74–79.
- Ras, A. (2013). Pemerdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Rayyan, M. A. (2020). Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Analysis of Program Suitability with Target Groups on MSME Development in Sidoarjo Regency. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(1), 63–76.
- Sihombing, A., & Iswandi, D. (2022). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Realisasi Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 843–856.
- Sukidjo. (2009). Strategi Pemerdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada Pnpm Mandiri. *Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 155–164.

- Wongsonadi, S. K. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. *Sarwahita, 11*, 82–86. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.112.04>
- Wulandari, S., Oktaviani, S., Adam, M. R., Barat, J., Author, C., Wulandari, S., & Pemerintahan, F. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development Centre (Sdc) Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Di Kabupaten Bandung Barat. *Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14*(2), 310–333.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (J. Yursa (ed.); I). Bandar Publishing.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).